



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 14 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI BALI
UNIT KERJA : BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH

I. DATA PRIBADI

- Nama : I PUTU ASTARIKA
- Jabatan : BENDAHARA
- NHK : 880156

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 1.500.500.000

- Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/160 m2 di KOTA DENPASAR, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 224.000.000

- MOBIL, TOYOTA AVANZA VELOZ Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 184.000.000
- MOBIL, NISSAN SUNNY Tahun 1997, HASIL SENDIRI Rp. 15.950.000
- MOTOR, HONDA SUPRA X 125 FI Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 6.450.000
- MOTOR, SUZUKI ADDRESS Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 6.700.000
- MOTOR, HONDA VARIO Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 5.950.000
- MOTOR, YAMAHA JUPITER Z1 Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 4.950.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 89.790.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 5.561.600

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 101.800.475

F. HARTA LAINNYA Rp. 40.062.010

Sub Total Rp. 1.961.714.085

III. HUTANG Rp. 69.086.838

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.892.627.247



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.